

# PENGUATAN TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK MELALUI EVALUASI SISTEM INFORMASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (SIPEKAN) DI KOTA BATU

## Strengthening Public Service Governance through Evaluating the Housing and Settlement Information System (SIPEKAN) in Batu City

Agung Suprojo<sup>1\*</sup>  
Abd. Rohman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tribhuwana  
Tunggadewi, Malang

\*email: [asuprojo@gmail.com](mailto:asuprojo@gmail.com)

### Abstrak

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah menuntut adanya evaluasi terhadap implementasi sistem informasi guna memastikan efektivitas pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Batu dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan evaluatif deskriptif melalui studi dokumen, observasi sistem, dan analisis proses pelayanan. Hasil menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan integrasi data perumahan, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta memperkuat transparansi informasi kepada masyarakat. Selain itu, sistem ini berkontribusi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui penyediaan fitur analitik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti belum optimalnya pemutakhiran data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum tersedianya indikator kinerja yang terukur, serta belum optimalnya integrasi lintas perangkat daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya pendukung. Dengan demikian, penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan arah pengembangan sistem secara berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran sistem informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Kata Kunci:**  
SIPEKAN  
Pelayanan publik  
SPBE  
Pengabdian masyarakat

**Keywords:**  
SIPEKAN  
Public Services  
SPBE  
Community Engagement

### Abstract

Digital transformation in local government governance requires systematic evaluation of information system implementation to ensure effective public service delivery. This study aimed to evaluate the implementation of the Housing and Settlement Area Information System in Batu City in strengthening public service governance. The study employed a descriptive evaluative approach through document review, system observation, and service process analysis. The results show that the system has improved the integration of housing data, accelerated administrative service processes, and enhanced information transparency for the public. In addition, the system contributes to data-driven decision-making through the provision of analytical features. However, several challenges remain, including suboptimal data updating mechanisms, limited human resource capacity, the absence of measurable performance indicators, and incomplete cross-agency integration. These findings indicate that the success of system implementation is determined not only by technological factors but also by institutional readiness and supporting resources. Therefore, strengthening data governance, enhancing administrative capacity, and developing a sustainable system development framework are essential strategies to optimize the role of information systems in improving public service quality.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 04-05-2026

Accepted: 01-06-2026

Published: 20-06-2026

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah pada era digital saat ini tidak lagi hanya dituntut untuk menjalankan program dan kegiatan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan mampu memberikan

dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Digitalisasi

layanan publik tidak hanya meningkatkan kecepatan pelayanan, tetapi juga mendorong integrasi data, akuntabilitas, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis informasi (Hadi and Widnyani, 2024). Dalam konteks ini, evaluasi terhadap implementasi sistem digital menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Evaluasi program pemerintah merupakan bagian integral dari siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu kebijakan. Tanpa evaluasi yang sistematis, program yang dijalankan berpotensi mengalami stagnasi bahkan kegagalan karena tidak adanya mekanisme umpan balik yang memadai. Studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Indonesia mengalami peningkatan secara nasional, namun masih terdapat kesenjangan antar daerah dalam hal kualitas layanan, integrasi sistem, dan kapasitas sumber daya manusia (Sugianto *et al.*, 2025; Aulia *et al.*, 2025; Andesca and Abda, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya penting, tetapi juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis bukti agar mampu mendorong perbaikan kebijakan secara adaptif.

Dalam praktiknya, evaluasi yang dilakukan secara internal seringkali menghadapi keterbatasan, terutama terkait dengan objektivitas penilaian. Oleh karena itu, keterlibatan pihak eksternal seperti akademisi dari perguruan tinggi menjadi sangat penting. Akademisi memiliki kapasitas metodologis dan independensi yang memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara lebih komprehensif dan kritis. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga mencerminkan pendekatan *governance* yang kolaboratif, di mana berbagai aktor terlibat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian terkini juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi, kapasitas sumber daya, serta integrasi lintas sektor yang

membutuhkan perspektif multidisipliner dalam evaluasinya (OECD, 2020).

Salah satu sektor yang memerlukan penguatan tata kelola berbasis digital adalah bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sektor ini memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan wilayah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengembangkan inovasi berupa Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIPEKAN). Sistem ini dirancang sebagai platform digital berbasis website yang mengintegrasikan data legalitas, teknis, dan spasial perumahan dalam satu sistem terpadu, sehingga mampu mendukung proses perencanaan, pengawasan, dan pelayanan publik secara lebih efektif.

Meskipun SIPEKAN merupakan inovasi yang progresif, implementasi sistem digital tidak terlepas dari berbagai tantangan. Studi mengenai implementasi SPBE menunjukkan bahwa hambatan utama seringkali terletak pada aspek integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan (Janowski, 2015; Gil-Garciaa, Dawes and Pardo, 2018). Selain itu, penelitian terbaru juga mengungkapkan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik masih menghadapi kendala dalam aspek komunikasi kebijakan, struktur birokrasi, serta ketersediaan sumber daya yang memadai (Sumarhaeti, 2025; Yumame and Gainau, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya pendukungnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi SIPEKAN di Kota Batu. Evaluasi dilakukan pada periode Februari hingga Maret 2026 dengan tujuan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta potensi

pengembangan sistem ke depan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada dimensi tata kelola, pelayanan publik, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi SIPEKAN dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.

Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan evaluasi yang tidak hanya melihat SIPEKAN sebagai aplikasi layanan, tetapi sebagai instrumen pengendalian kebijakan berbasis data (*policy-driven system*). Pendekatan ini menempatkan sistem informasi sebagai bagian dari ekosistem tata kelola pemerintahan yang lebih luas, bukan sekadar alat administratif. Selain itu, kegiatan ini juga mengintegrasikan perspektif akademik dalam evaluasi kebijakan publik, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya praktis tetapi juga berbasis kajian ilmiah mutakhir. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan evaluatif-deskriptif yang bertujuan untuk menilai implementasi SIPEKAN secara komprehensif, baik dari aspek teknis maupun tata kelola. Kegiatan dilaksanakan pada periode Februari hingga Maret 2026 melalui tahapan yang terstruktur sebagai berikut:

### Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu sebagai mitra, identifikasi kebutuhan evaluasi, serta pengumpulan dokumen awal yang relevan. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan fokus evaluasi yang mencakup

aspek integrasi data, efisiensi pelayanan, transparansi informasi, dan keberlanjutan sistem.

### Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi langsung terhadap sistem SIPEKAN, serta penelaahan terhadap proses pelayanan administrasi perumahan. Observasi difokuskan pada alur layanan, fitur sistem, serta pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik evaluasi kebijakan berbasis bukti yang menekankan pentingnya data empiris dalam analisis (Dunn, 2018).

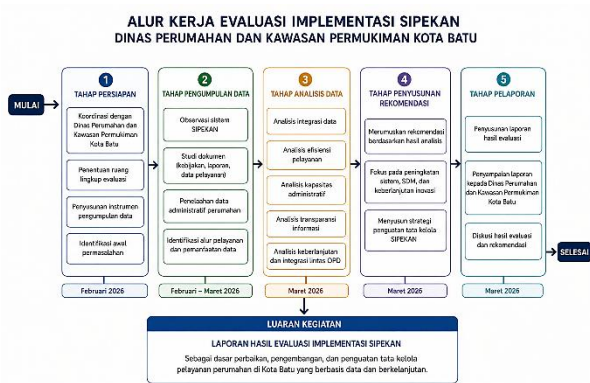
### Tahap Analisis dan Evaluasi

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu tata kelola data, efisiensi pelayanan, kapasitas administratif, transparansi publik, dan integrasi lintas perangkat daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi SIPEKAN serta mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) yang masih terjadi.

### Tahap Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi strategis yang bersifat aplikatif dan berorientasi pada peningkatan kualitas sistem. Rekomendasi difokuskan pada penguatan indikator kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi fitur analitik, serta pengembangan roadmap keberlanjutan sistem.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini menghasilkan luaran berupa laporan evaluasi yang tidak hanya menggambarkan kondisi aktual implementasi SIPEKAN, tetapi juga memberikan arah pengembangan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.



**Gambar 1. Alur Kerja Evaluasi Implementasi SIPEKAN**

Sumber: diolah pengabd, 2026

Alur kerja evaluasi SIPEKAN menunjukkan proses yang sistematis dan berurutan, dimulai dari tahap persiapan hingga pelaporan sebagai luaran utama. Setiap tahapan saling terhubung dan menekankan pentingnya pengumpulan serta analisis data sebagai dasar penyusunan rekomendasi. Model ini mencerminkan pendekatan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif, terarah, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penguatan Tata Kelola melalui SIPEKAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi SIPEKAN telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman di Kota Batu. Sebelum adanya sistem ini, data perumahan cenderung tersebar di berbagai unit kerja dengan format yang tidak seragam, sehingga menyulitkan proses integrasi dan validasi. Dengan hadirnya SIPEKAN, data legalitas, teknis, dan spasial berhasil dihimpun dalam satu platform terpadu, yang secara langsung meningkatkan kualitas tata kelola berbasis data.

Transformasi ini sejalan dengan konsep data-driven governance, di mana kebijakan publik tidak lagi berbasis asumsi, melainkan pada data yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time. Studi terbaru menunjukkan

bahwa integrasi data merupakan fondasi utama dalam penguatan SPBE, karena memungkinkan sinkronisasi antar sektor serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Sugianto *et al.*, 2025; Aulia *et al.*, 2025; Andesca and Abda, 2025). Dalam konteks ini, SIPEKAN telah berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung proses perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan di tingkat daerah.

Namun demikian, hasil evaluasi juga mengidentifikasi bahwa mekanisme pemutakhiran data secara berkala masih belum berjalan optimal. Tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait pembaruan data, terdapat risiko terjadinya ketidaksesuaian informasi dalam sistem. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar manfaat SIPEKAN dapat berkelanjutan dan semakin optimal.

### Efisiensi Pelayanan Administrasi dan Digitalisasi Proses

Implementasi SIPEKAN telah mendorong terjadinya digitalisasi proses pelayanan administrasi perumahan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Proses verifikasi dan pengolahan dokumen yang dahulu memerlukan waktu cukup panjang kini dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien melalui sistem berbasis website. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan akses layanan.

Digitalisasi pelayanan ini juga berkontribusi dalam mengurangi beban kerja aparatur serta meminimalisasi potensi kesalahan administratif. Menurut Hadi and Widnyani (2024), digitalisasi layanan publik mampu meningkatkan efisiensi organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi. Temuan dalam kegiatan pengabdian ini memperkuat argumen tersebut, di mana SIPEKAN telah menjadi alat yang efektif dalam menyederhanakan alur pelayanan dan meningkatkan

responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi pelayanan belum sepenuhnya didukung oleh indikator kinerja kuantitatif yang terukur. Hal ini menjadi tantangan dalam menilai sejauh mana dampak sistem terhadap peningkatan kinerja pelayanan secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan indikator berbasis waktu layanan dan output pelayanan sebagai dasar evaluasi yang lebih komprehensif.

### **Transparansi Informasi dan Perlindungan Masyarakat**

Salah satu capaian penting dari implementasi SIPEKAN adalah meningkatnya transparansi informasi terkait status legalitas perumahan. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi perizinan dan kondisi perumahan, sehingga dapat meminimalisasi risiko penipuan serta konflik lahan. Transparansi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Ketersediaan informasi yang terbuka juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam literatur terbaru, transparansi digital terbukti mampu meningkatkan legitimasi kebijakan serta partisipasi publik dalam proses pemerintahan (OECD, 2021). SIPEKAN, dalam hal ini, telah berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan sistem oleh masyarakat masih belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas teknologi perlu diimbangi dengan strategi sosialisasi yang efektif serta penyederhanaan tampilan informasi. Tanpa upaya tersebut, potensi SIPEKAN sebagai instrumen perlindungan masyarakat belum dapat dimaksimalkan secara menyeluruh.

### **Kapasitas Administratif dan Pemanfaatan Fitur Analitik**

Evaluasi juga menunjukkan bahwa SIPEKAN telah menyediakan fitur analitik dan dashboard yang berpotensi mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Fitur ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan perumahan serta mengidentifikasi potensi permasalahan secara lebih dini. Dengan demikian, SIPEKAN tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen analisis kebijakan.

Namun, pemanfaatan fitur analitik tersebut masih belum optimal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penggunaan dashboard secara maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan Janowski (2015); Gil-Garciaa, Dawes and Pardo (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dalam mengelola dan menganalisis data.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberlanjutan SIPEKAN. Pelatihan berkelanjutan serta penguatan literasi data di kalangan aparatur perlu dilakukan agar sistem yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

### **Keberlanjutan Inovasi dan Integrasi Lintas Perangkat Daerah**

Aspek keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi implementasi SIPEKAN. Meskipun sistem ini telah menunjukkan berbagai capaian positif, keberlanjutan inovasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi lintas perangkat daerah. Saat ini, integrasi dengan instansi terkait seperti DPMPSTSP, ATR/BPN, dan Bappeda belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga membatasi potensi pemanfaatan data secara lintas sektor.

Selain itu, belum tersusunnya roadmap pengembangan sistem menjadi kendala dalam perencanaan jangka menengah dan panjang. Tanpa arah pengembangan yang jelas, inovasi berisiko mengalami stagnasi atau bahkan tidak berlanjut. Studi terbaru menunjukkan bahwa keberlanjutan inovasi digital dalam pemerintahan sangat bergantung pada dukungan regulasi serta perencanaan strategis yang terstruktur (OECD, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal serta penyusunan roadmap pengembangan SIPEKAN untuk periode 3–5 tahun ke depan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa SIPEKAN tidak hanya menjadi inovasi jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam penguatan tata kelola perumahan yang berkelanjutan.



**Gambar 2. SIPEKAN Kota Batu**

Sumber: <https://sipekan.batukota.go.id/>

Gambar di atas merepresentasikan tampilan antarmuka aplikasi SIPEKAN sebagai sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman di Kota Batu. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana integrasi data dan layanan publik disajikan dalam satu platform digital yang mudah diakses oleh pengguna. Keberadaan antarmuka yang informatif dan terstruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi sistem.

## RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, rencana tindak lanjut difokuskan pada penguatan aspek teknis dan kelembagaan untuk memastikan optimalisasi

implementasi SIPEKAN. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) terkait pemutakhiran dan validasi data secara periodik, disertai dengan penetapan indikator kinerja layanan yang terukur, seperti waktu penyelesaian layanan, jumlah permohonan, dan tingkat kepatuhan perizinan. Selain itu, diperlukan pengembangan dan pemanfaatan fitur dashboard analitik secara lebih optimal melalui pelatihan teknis bagi aparatur pengelola, sehingga sistem tidak hanya digunakan sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data.

Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan inovasi, perlu dilakukan penguatan regulasi internal melalui penyusunan kebijakan formal (SK atau Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tata kelola SIPEKAN. Integrasi sistem dengan perangkat daerah terkait seperti DPMPTSP, ATR/BPN, dan Bappeda juga perlu dipercepat melalui pengembangan sistem interoperabilitas data. Di samping itu, penyusunan roadmap pengembangan SIPEKAN untuk jangka menengah (3–5 tahun) menjadi langkah strategis guna memastikan arah pengembangan yang terstruktur. Upaya ini perlu didukung dengan strategi sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan literasi digital agar pemanfaatan sistem dapat lebih merata dan berdampak luas.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa evaluasi implementasi SIPEKAN telah mampu menjawab kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Batu. Permasalahan utama yang dihadapi, seperti keterpaduan data, efisiensi pelayanan, transparansi informasi, serta keberlanjutan sistem, telah ditangani melalui solusi berupa pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis digital. Metode evaluatif-deskriptif yang diterapkan melalui observasi sistem, studi

dokumen, dan analisis kinerja pelayanan terbukti efektif dalam mengidentifikasi capaian dan kendala implementasi secara komprehensif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SIPEKAN berkontribusi dalam meningkatkan integrasi data, mempercepat pelayanan administrasi, serta memperkuat transparansi publik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek indikator kinerja, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi lintas perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara persoalan yang dihadapi, kebutuhan yang ingin dicapai, solusi yang diberikan, serta metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu atas dukungan, keterbukaan data, serta kerja sama yang sangat baik selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Batu yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada tim dalam melaksanakan evaluasi program SIPEKAN sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik.

Selain itu, penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas dukungan akademik dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Tidak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik di daerah.

### REFERENSI

Andesca, C.P. and Abda, A. (2025) 'Spbe dan

modernisasi birokrasi: kajian literatur mengenai tantangan integrasi layanan digital dan governance digital', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9). Available at: <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/2755>.

Aulia, V.R. et al. (2025) 'Mapping SPBE Challenges in Indonesia: Systematic Review by Architecture Domain', *JUKTISI (Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer)*, 4(1), pp. 174–183. Available at: <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i1.368>.

Dunn, W.N. (2018) *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge.

Gil-Garcia, J.R., Dawes, S.S. and Pardo, T.A. (2018) 'Digital government and public management research: finding the crossroads', *Public Management Review*, 20, pp. 633–646. Available at: <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>.

Hadi, I. and Widnyani, I.A.P.S. (2024) 'Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )', *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, 6(2), pp. 639–658. Available at: <https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398>.

Janowski, T. (2015) 'Digital government evolution: From transformation to contextualization', *Government Information Quarterly*, 32(3), pp. 221–236. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>.

OECD (2020) 'The digital government index 2019: Results and key findings'. Paris: OECD Publishing. Available at:

<https://doi.org/https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>.

OECD (2021) 'Government at a Glance 2021'.

OECD Publishing. Available at:  
<https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-22214399.htm>.

Sugianto, L.P.M. et al. (2025) 'TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: ANALISIS LONGITUDINAL DOMAIN SPBE TAHUN 2018-2024', *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 9(2), pp. 287–300. Available at:  
<https://doi.org/10.52362/jisicom.v9i2.2091>.

Sumarhaeti, H. (2025) 'Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur', *Rural and Regional Government*, 9(2), pp. 241–248. Available at:  
<https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.715>.

Yumame, J. and Gainau, A.W. (2025) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN LANNY JAYA', *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(3), pp. 3031–7584. Available at:  
<https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2098>.